

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN KOMPETENSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Survei Pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sragen)**

Resti Dwi Samsiyah¹⁾

Suharno²⁾

Bambang Widarno³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail : restijanuari1998@gmail.com

ABSTRACT

This research accomplished to analyze the influence of goal budget clarity, accounting controls, and competence towards the performance accountability of government institution Sragen agency. The types of data collected were in form of quantitative. The source of the data used were primary data. The technique of data sampling were purposive sampling. Samples were used as much 81 respondents to the head of agency and the financial section. How to collect data by deploying questionnaires to the organization of the regional devices district of Sragen. Based on the test result from the research obtained in conclusion that, goal budget clarity influence has significant positive effect to performance accountability of government institution, accounting control has a significant positive effect to performance accountability of government institution, competence has a significant positive effect to performance accountability of government institution Sragen agency.

Keywords: *goal budget clarity, accounting control, competence, and performance accountability of government agency*

PENDAHULUAN

Kegiatan organisasi pemerintah daerah harus dapat mengukur dan mengeterkaitkan antara pencapaian arah organisasi dimasa mendatang yang dapat ditunjukkan melalui suatu tujuan dan program organisasi yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintahan beranggapan bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan melaksanakan tugas utama dan fungsi hanya berpusat kepada kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan yang dialokasikan, yakni keberhasilan organisasi yang hanya ditekan pada sudut apa yang dibuat tanpa melihat tingkat keberhasilannya atau efeknya dari standar (BPKP, 2000). Keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dilihat dari seluruh aktivitas yang diukur dan indikator pengukurannya tidak hanya dari inputnya tetapi harus pada manfaatnya dari suatu kegiatan.

Penggunaan sumber daya dapat dilakukan dalam akuntabilitas publik secara ekonomis, efektif, efisien, adil dan merata (Mardiasmo, 2002: 66). Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang wajib dilakukan pemerintah daerah. Pertama, pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pusat. Kedua, pertanggungjawaban horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002: 21). Kedua pertanggungjawaban tersebut penting dalam proses akuntabilitas. Dalam hal ini

informasi yang diberikan pemerintah pusat serta daerah harus mampu sebagai pemberi data secara relevan, ketepatan waktu, akurat, dan bisa dipercaya keandalannya.

Fenomena yang terkait instansi pemerintah yaitu terkait hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan Sragen pada peringkat ke 20 Kabupaten/Kota (<https://joglosemarnews.com>). Hasil evaluasi SAKIP 2019 diikuti oleh provinsi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan Penghargaan sebanyak 186 pemerintah daerah di wilayah III yang terdiri dari 174 pemerintah Kabupaten/Kota dan 12 pemerintah provinsi. Posisi Sragen menggungguli kota Solo, Boyolali, dan Klaten. Namun Sragen kalah dengan Karanganyar satu trap di atasnya meski sama-sama meraih nilai B (Baik). Nilai yang diperoleh Sragen ini dikarenakan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah yang membaik. Namun Sragen masih menargetkan untuk mendapatkan nilai A (Memuaskan) di tahun berikutnya sehingga perlu dilakukan banyak evaluasi dalam perencanaan untuk dapat menaikkan peringkatnya.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain penelitian dilakukan Cefrida dkk (2014) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fitriana dkk.(2018) juga menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Pratama dkk.(2019) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Cefrida dkk (2014) Menunjukkan hasil pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda hasil diperoleh dari Fitriana dkk.(2018) menunjukkan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pratama dkk(2019) menunjukkan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peneliti wardhana dkk(2015) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Sofyani dan Akbar (2015) menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil tugas akhir dengan judul “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk: 1) Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2) Untuk menganalisis pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tinjauan Pustaka **Teori Agensi**

Menurut Jasen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan sebuah perjanjian dimana satu atau lebih (*principal*) menyuruh orang lain (*agent*) untuk menjalankan beberapa jasa bagi kebutuhan principal. Berhubungan persoalan keagenan, perincian laporan keuangan suatu organisasi sektor publik yang merupakan sesuatu yang bersumber pada teori keagenan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak maupun kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAN RI dan BPKP, 2001: 43)

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah suatu sasaran alokasi dana yang digambarkan secara transparan dan rinci bertujuan agar anggaran yang berada didalam laporan bisa dipahami para pihak-pihak yang berkewajiban terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979).

Pengendalian Akuntansi

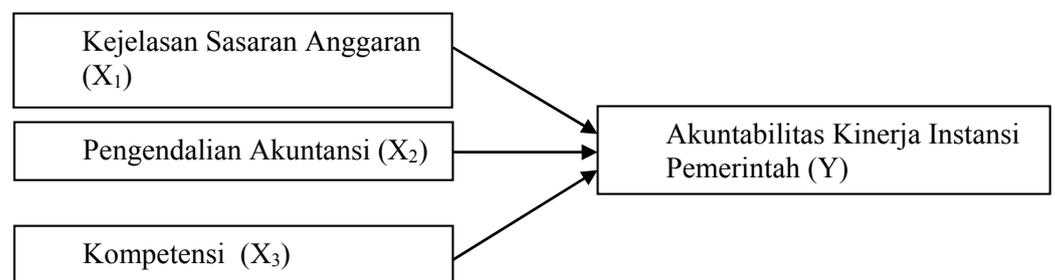
Pengendalian keuangan biasanya dikatakan sebagai pengendalian akuntansi adalah suatu perangkat kebijakan dan metode yang membatasi kemudian menjadikan pedoman untuk kegiatan-kegiatan dalam pemeriksaan data keuangan yang bertujuan menghalangi maupun melacak kesalahan serta perbuatan kecurangan (Carter, 2009: 165).

Kompetensi

Kompetensi merupakan sekumpulan pengetahuan yang luas, ketrampilan, sifat, dan perilaku berkaitan dengan antar pribadi atau berpusat pada pekerjaan (Mondy, 2008: 261). Mengingat organisasi berjalan dinamis maka pengembangan kompetensi merupakan hal yang harus dilakukan secara berskala dan terencana dalam suatu organisasi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran diatas bisa dijelaskan seperti

berikut:

1. Variabel Bebas
Variabel yang mempengaruhi variabel terikat adalah variabel bebas. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan kompetensi merupakan variabel bebas.
2. Variabel Terikat
Variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan variabel terikat.

Hipotesis

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan diatas. Berikut merupakan sebuah perluasan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran pemerintah yang dibuat harus sesuai dengan sasaran dan tujuan dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang apabila ditetapkan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tidak jelas maka akan menyebabkan permasalahan. Kejelasan sasaran anggaran dapat memberikan manfaat yang baik bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan dikalangan masyarakat.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian dalam perencanaan dan pelaporan yang didasarkan pada informasi. Pengendalian akuntansi akan dapat mempermudah instansi pemerintah dalam mengendalikan dan mengamati semua kegiatan. Pengendalian ini akan menekan tingkat kesalahan dalam pelaksanaan. Keberadaan pengendalian akuntansi akan dapat memberikan manfaat baik dalam pengendalian instansi pemerintah.

H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi diyakini mampu mendukung organisasi dalam pencapaian tujuan melalui sumber daya manusia yang berada didalamnya. Kompetensi dapat digunakan sebagai landasan dalam mengelola kemampuan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai. Orang yang memiliki kompetensi yang memadai diharapkan mempunyai kinerja yang baik juga sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

H3: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sragen setingkat Dinas,

Badan, Sekertaria, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Metode survei merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data kuantitatif dari hasil jawaban pertanyaan kuesioner dari responden. Sumber data yang digunakan data primer yang didapat langsung dari dinas/instansi OPD melalui pengisian kuesioner yang diberikan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD pada Kabupaten Sragen yang berjumlah 27 dinas/instansi. Sampel dalam penelitian ini seluruh kepala OPD dan 2 pegawai bagian keuangan melalui teknik pengambilan menggunakan *purposive sampling method* dan jumlah sampel responden sebanyak 81.

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Data

Uji asumsi klasik

Hasil pengujian asumsi klasik akan dijelaskan tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik	Hasil	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,570, 0,573, 0,985) > 0,10 <i>VIF</i> (1,754, 1,744, 1,015) < 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Autokolerasi	<i>p</i> 0,065 > 0,05	Tidak terjadi Autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	<i>p</i> (0,331, 0,393, 0,147) > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Uji Normalitas	<i>p</i> 0,644 > 0,05	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Primer, 2020

Hasil uji analisis regresi linier berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F serta koefisien determinasi (R^2). Hasil uji akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Analisis regresi linier berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig
		B	Std Error			
1	(Constant)	,414	2,258		,183	,855
	X1	,403	,070	,558	5,789	,000

X2	,181	,073	,238	2,476	,015
X3	,166	,078	,156	2,130	,036

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil uji regresi linier berganda memperoleh persamaan regresi:

$$Y = 0,141 + 0,403 X_1 + 0,181 X_2 + 0,166 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah:

- a : 0,414 artinya apabila kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan kompetensi tidak ada maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,414.
- b₁: 0,403 pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X₁) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) berpengaruh positif. Artinya semakin baik kejelasan sasaran anggaran yang dibuat, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b₂: 0,181 pengaruh pengendalian akuntansi (X₂) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) berpengaruh positif. Artinya semakin tinggi pengendalian akuntansi, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin meningkat.
- b₃: 0,166 pengaruh kompetensi (X₃) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) berpengaruh positif. Artinya semakin meningkatnya kompetensi dalam instansi pemerintah, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji t

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,789 dengan $p-value$,000 atau $< 0,05$ mengartikan H_a diterima atau H_0 ditolak. Hasil ini berarti variabel kejelasan sasaran anggaran (X₁) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi diperoleh t_{hitung} sebesar 2,476 dengan $p-value$ sebesar 0,015 atau $< 0,05$ mengartikan H_a diterima atau H_0 ditolak. Hasil ini berarti variabel pengendalian akuntansi (X₂) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis menunjukkan kompetensi di peroleh t_{hitung} sebesar 2,130 dengan $p-value$ 0,036 atau $< 0,05$ mengartikan H_a diterima atau H_0 ditolak. Hasil ini berarti variabel kompetensi (X₃) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Tabel berikut ini menjelaskan hasil uji F yang diperoleh :

Tabel 3. Hasil uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,430	3	63,477	37,353	,000 ^b
	Residual	128,792	77	1,673		
	Total	316,222	80			

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai (*sig*) ,000 kurang dari 0,05. Hasil ini berarti variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan kompetensi (variabel bebas) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel terikat).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk menggambarkan model dan menerangkan variasi yang menjadi variabel dependen sebagai penjelas dalam bentuk presentase. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) akan dijelaskan tabel berikut:

Tabel 4. Uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,770 ^a	,593	,577	1,293

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai (*adjusted R²*) adalah 0,577. Artinya 57,7% variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan kompetensi) dalam model tersebut. Sisanya sebanyak 42,3% diterangkan oleh variabel yang lain di luar model misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, komitmen organisasi, sistem pelaporan, kompensasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan.

Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,789 dengan *p-value* 0,000 atau $< 0,05$ artinya H_a diterima atau H_0 ditolak. Maka disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengendalian akuntansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,476 dengan $p-value$ 0,015 atau $< 0,05$ artinya H_a diterima atau H_o ditolak. Maka disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Kompetensi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,130 dengan $p-value$ 0,036 artinya H_a diterima atau H_o ditolak. Maka disimpulkan kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 0,577 atau 57,7% menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas, sehingga penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Sragen, mengetahui pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Sragen untuk selalu mengontrol dan mengevaluasi agar terus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti misalnya ketaatan peraturan perundangan, komitmen organisasi, sistem pelaporan, kompensasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Selain itu perlu memperluas populasi dan menambah sampel untuk mengetahui pengaruhnya di akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian mendatang metode yang digunakan selama penelitian ini hanya dengan metode survei, menyebarkan kuesioner, semata-mata hanya dapat menggambarkan kondisi atau keadaan yang bersifat sementara.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang diteliti sehingga belum mampu menggambarkan fenomena akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Carter, W.K., (2009). *Akuntansi Biaya* (14th ed). Jakarta: Salemba Empat.

Cefrida, Mentari S, E. Nur, dan M. A Hasan. 2014. "*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.*" Pekanbaru: Universitas Riau.

Fitriana R, N Hidayati, M. D Wardani. 2018. "*Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.*" Universitas Islam Malang.

Jansen and W.H Meckling, 1976. *Theory of the Firm: Managerial behavior, agency and ownership structure*, journal of financial Economic 3: 305-360.

Joglosemarnews diakses Oktober 2019 hingga juli 2020, Dapat nilai B, Kabupaten Sragen raih SAKIP award 2019. Ungguli Solo dan Boyolali, tapi kalah sama Wonogiri.

<https://joglosemarnews.com/2019/02/dapat-nilai-b-kabupaten-sragen-raih-sakip-award-2019-ungguli-solo-dan-boyolali-tapi-kalah-sama-wonogiri/?amp>

Kenis. 1979. *The Effect on Budgetary Goal 5 Characteristic on Manajerial Attitudes and Performance*. *Accounting Review October*, pp. 707-721

LAN dan BPKP. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.

Mardiasmo, 2002. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mondy, R.W. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 1 Edisi 10. Penerbit Erlanga.

Pratama, R., Agustin, H & Taqwa, S. (2019). “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*” 1 (1) Seri D, 429-444.

Sofyani, H. & Akbar R., 2014. “Hubungan Faktor Teknis, Organisasional Dan Karakteristik Individu Pegawai Pemda Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Di Pemerintah Daerah.” Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.

Wardhana, Gede., N. Rasmini dan I. Astika, 2015. “Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi.” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.